



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2017

**Dinas Sosial Kota Jambi
Jln. Jend. Sudirman No. 156 Telp. 0741-24193 Fax. 0741 - 31682
JAMBI - 36128**

BAB. I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam rangka peningkatan harkat , martabat dan kualitas hidupnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang timbul, dengan mengedepankan prakarsa dan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada.

Permasalahan kesejahteraan sosial kerja cenderung meningkat, seiring dengan derasnya arus globalisasi yang melanda dunia termasuk Indonesia, Sementara itu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan social terus meningkat dan professional seiring dengan dengan Hak-haknya selaku warga Negara. Oleh sebab itu berbagai dampak positif dan negative dari persoalan sosial semakin meningkat.

Pembangunan kesejahteraan sosial depan akan semakin kompleks dan multi demisional, karena masalah sosial berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lapisan bawah, yang dampaknya langsung berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti disintegrasi sosial, diskriminasi sosial, kesenjangan sosial, sistem nilai budaya bangsa (kesetiakawanan sosial) dan sebagainya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah khususnya masalah kesejahteraan sosial diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif, dengan membuat Penetapan Indikator Kinerja berupa INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017 Dinas Sosial Kota Jambi sebagai acuan sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2017 adalah untuk menentukan komponen utama Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial Kota Jambi dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan Instansi Pemerintah dalam rangka mencapai Visi dan Misinya khususnya pada Dinas Sosial Kota Jambi pada tahun anggaran 2017.

2. TUJUAN

Tujuan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur kauntitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2017
- b. Untuk memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai .
- c. Untuk menentukan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

C. LANDASAN HUKUM

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2017 disusun berdasarkan landasan hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 3) Undang-Undang Nomor 13 tentang 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
- 6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat.
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 16) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025;
- 18) Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi;

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial merupakan salah satu OPD di Kota Jambi. Pendirian Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah . Dinas Sosial mempunyai TUGAS pokok yaitu :

Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan Tugas Pembantuan yang meliputi :Tugas Perencanaan, Pembinaan,Pengawasan, Pengendalian, Pelayanan dan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya yang terdiri dari sekretariat dan empat bidang yang meliputi bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kota Jambi mempunyai FUNGSI yaitu :

1. Perumusan, Penetapan , dan Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial,rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir msikin;
2. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
3. Penetapan standar rehabilitasi sosial;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan adminstrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan dinas sosial;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas sosial;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan dinas sosial;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan dinas sosial di daerah;
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial;
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan sosial;dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

E. SUSUNAN ORGANISASI

Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Kepegawaian

- c. **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang dibantu oleh:**
 - 1. **Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.**
 - 2. **Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.**
 - 3. **Seksi Jaminan Sosial Keluarga.**
- d. **Bidang Rehabilitasi Sosial, yang dibantu oleh:**
 - 1. **Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.**
 - 2. **Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.**
 - 3. **Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Napza.**
- e. **Bidang Pemberdayaan Sosial, yang dibantu oleh:**
 - 1. **Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat.**
 - 2. **Kepala Seksi Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.**
 - 3. **Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.**
- f. **Bidang Penanganan Fakir Miskin, yang dibantu oleh:**
 - 1. **Kepala Seksi Pendataan Informasi Fakir Miskin.**
 - 2. **Kepala Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Fakir Miskin.**
 - 3. **Kepala Seksi Pembinaan dan Pelayanan Fakir Miskin.**
- g. **Unit pelaksanaan teknis dinas**
- h. **Kelompok Jabatan Fungsional**

BAB II

VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI

Visi merupakan pandangan jauh kedepan tentang keinginan atau cita-cita suatu organisasi yang hendak diwujudkan secara bersama-sama. Visi Dinas Sosial Kota Jambi mengacu kepada Visi Kota Jambi menuju Kota Jambi BANGKIT.

Didalam Rencana Strategik Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2013 – 2018 dimuat VISI Dinas Sosial Kota Jambi, yaitu :

**TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL YANG BERKUALITAS DAN
BERAKHLAK MENUJU KOTA JAMBI BANGKIT**

Maksud dari pernyataan Visi tersebut yaitu mewujudkan pelaksanaan pelayanan sosial yang mengutamakan kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

B. MISI

Misi merupakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh Organisasi sebagai penjabaran dari pada Visi, yang menjadi penggerak terhadap wujudnya Misi tersebut.

Menurut keputusan LAN Nomor : 589/IX/6/Y/99 Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Berorientasi pada Visi tersebut menetapkan MISI maka Dinas Sosial Kota Jambi sebanyak 2 (dua) Misi antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Membangun kemandirian dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

C. TUJUAN.

Penetapan tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi dan didasarkan pada faktor – faktor kunci keberhasilan, penekanan pada faktor kunci keberhasilan dimaksudkan agar dalam pencapaian tujuan benar – benar telah memperhatikan

faktor lingkungan dan mengetahui secara jelas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, maka TUJUAN yang ingin dicapai dalam waktu tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatkan Kualitas sumber Daya dan Disiplin Aparatur.
4. Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan.
5. Meningkatkan Penyusunan Rencana Kerja SKPD
6. Meningkatkan pengetahuan keterampilan berusaha membuat kuliner dan membuat kue bagi keluarga miskin dan peralatan bagi KUBE fakir miskin melalui pemberian bantuan peralatan berusaha untuk 95 orang keluarga miskin dalam 1 Tahun.
7. Melakukan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, serta bantuan kepada korban bencana dan meningkatkan kemampuan keterampilan taruna siaga bencana (TAGANA) kota Jambi dalam penanggulangan dan pendistribusian bantuan sosial bagi korban bencana alam di kota Jambi.
8. Melakukan sinkronisasi pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di kota Jambi dan meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) penerima PKH di kota Jambi untuk 8.564 RTSM penerima PKH.
9. Meningkatkan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat yakni pengetahuan dan keterampilan dan pengurus K3S,LK3 dan PSM kota Jambi untuk 50 orang pengurus.
10. Meningkatkan penertiban dan penanganan bagi PMKS dengan melaksanakan razia PSK,Gepeng dan Monitoring Gepeng sehingga terjadi penurunan tindakan prostitusi,gelandang atau pengemis dan anak terlantar.
11. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan sosial bagi Eks.PMKS,Lansia,Penyandang masalah disabilitas dan orang terlantar untuk 17 orang.

D. SASARAN.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu Instansi / organisasi Pemerintah. SASARAN dari Dinas Sosial Kota Jambi Kota Jambi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana Kantor yang memadai.
2. Terpenuhinya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
3. Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan yang sesuai ketentuan.
4. Tersedianya Program Kerja SKPD

5. Terlaksananya pengetahuan keterampilan berusaha membuat kuliner dan membuat kue bagi keluarga miskin dan peralatan bagi KUBE fakir miskin melalui pemberian bantuan peralatan berusaha untuk 95 orang keluarga miskin dalam 1 Tahun.
6. Terlaksananya Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, serta bantuan kepada korban bencana dan meningkatkan kemampuan keterampilan taruna siaga bencana (TAGANA) kota Jambi dalam penanggulangan dan pendistribusian bantuan sosial bagi korban bencana alam di kota Jambi.
7. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di kota Jambi dan meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) penerima PKH di kota Jambi untuk 8.564 RTSM penerima PKH.
8. Terlaksananya kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat yakni pengetahuan dan keterampilan dan pengurus K3S,LK3 dan PSM kota Jambi untuk 50 orang pengurus.
9. Terlaksananya penertiban dan penanganan bagi PMKS dengan melaksanakan razia PSK,Gepeng dan Monitoring Gepeng sehingga terjadi penurunan tindakan prostitusi,gelandang atau pengemis dan anak terlantar.
10. Terlaksananya pembinaan dan pelayan sosial bagi Eks.PMKS,Lansia,Penyandang masalah disabilitas dan orang terlantar untuk 17 orang.
11. Terlaksananya pembinaan dan pelayan sosial bagi Eks.PMKS,Lansia,Penyandang masalah disabilitas dan orang terlantar untuk 17 orang.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

A. KRITERIA INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Utama memenuhi 7 (tujuh) kriteria yang terdiri dari :

1. Langsung :

Suatu Indikator Kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator Kinerja tidak seharusnya dikaitkan dengan tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

2. Objektif :

Indikator yang objektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang diukur. Jadi terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, yaitu indikator tersebut mempunyai suatu dimensi dan tepat secara operasional. Mempunyai suatu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat, dengan menghindari penggabungan terlalu banyak fenomena dalam satu indikator. Tepat secara operasional artinya tidak ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.

3. Cukup :

Sebagai suatu kelompok, indikator kinerja dan indikator-indikator pendukung lainnya seharusnya secara cukup mampu mengukur hasil.

4. Kuantitatif (Jika Mungkin) :

Indikator dalam angka (jumlah atau persentase nilai dolar, tonase, sbb) yang bersifat pengamatan deskriptif (Pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku). meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketetapan angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai, namun, meskipun indikator kuantitatif yang efektif digunakan, indikator kuantitatif dapat mendukung angka dan persentase dengan kekayaan yang dimiliki informasi yang menghidupkan hasil program, indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kuantitatif.

5. Terinci (jika mungkin) :

Merinci/memilih hasil program di tingkat masyarakat dari segi jenis kelamin, umur, lokasi, atau dimensi lainnya biasanya penting dari sudut pandang manajer, pengalaman menunjukkan pengembangan kegiatan sering memerlukan pendekatan yang berbeda untuk kelompok yang berbeda dan mempengaruhi kelompok tersebut dengan cara yang berbeda, Data yang terinci membantu menelusuri apakah kelompok tertentu berpartisipasi atau tidak, dan kemanfaatan melibatkan kelompok tersebut dalam

kegiatan, oleh karena itu adalah baik bahwa indikator kinerja harus terhadap perbedaan tersebut.

6. **Praktis :**

Indikator kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya yang wajar, Manajer memerlukan data yang dapat dikumpulkan sesering mungkin untuk memberikan informasi kepada mereka mengenai suatu progres dan untuk mempengaruhi keputusan, untuk hanya akan mengeluarkan biaya yang wajar atau tidak berlebihan. berdasarkan pengalaman suatu instansi, biaya monitoring kinerja jumlahnya antara 3-10% dari jumlah sumberdaya program.

7. **Dapat diyakini :**

Pertimbangan terakhir dalam memilih indikator kinerja adalah apakah kualitas data yang memadai untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh. Namun standar kualitas data bagaimana yang diperlukan akan berguna. Data yang diperlukan seorang manajer program untuk membuat keputusan yang baik mengenai suatu program tidak perlu setara dengan standar yang kaku yang dipakai ilmuwan sosial, misalnya. Suatu survei singkat dengan biaya rendah sudahlah cukup untuk keperluan manajemen instansi, tidak perlu penelitian yang sangat kompleks dan rumit.

B. PERUMUSAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif, agar bermanfaat kedua jenis indikator kinerja tersebut harus memenuhi karakteristik kinerja yang baik sebagaimana disebutkan dimuka.

Indikator Kinerja kualitatif adalah Indikator kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan. misalnya tentang kepuasan pengguna jasa.

C. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017

Dari beberapa Sasaran Program Kegiatan maka ditetapkan Indikator kinerja Utama dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2017 pada Dinas Sosial Kota Jambi antara lain sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kota Jambi :**
 - a. Rasio Peningkatan Jumlah PMKS yang dilayani dan penanggulangan masalah-masalah Kesejahteraan Sosial per Tahun di Kota Jambi, dengan target sebesar 54%
 - b. Rasio Persentase Penduduk Miskin dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial, dengan target sebesar 7,80 %.

TABEL. 1

**TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 ATAS TARGET SASARAN IKU RPJMD KOTA JAMBI
 DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN 2017**

NO	MISI DAN TUJUAN RPJMD	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / SASARAN HASIL PEMBANGUNAN RPJMD (IKU RPJMD)	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5	6
1.	MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam Bingkai Kearifan Lokal				
	TUJUAN : Peningkatan Peran Serta Seluruh Lapisan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Mengembangkan Seni, Budaya serta Memperhatikan Kearifan Lokal	Terwujudnya Peningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Penanganan PMKS	Rasio Peningkatan Jumlah PMKS yang dilayani per - tahun	Meningkatkan penyuluhan, pembinaan dan penanganan PMKS	Program Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
			Rasio persentase penduduk miskin dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin	

TABEL. 2

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SASARAN HASIL PEMBANGUNAN RPJMD (IKU RPJMD)
KOTA JAMBI TAHUN 2017**

NO	MISI DAN TUJUAN RPJMD	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / SASARAN HASIL PEMBANGUNAN RPJMD (IKU RPJMD)	TARGET
1	2	3	4	5
1.	MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam Bingkai Kearifan Lokal			
	TUJUAN : Peningkatan Peran Serta Seluruh Lapisan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Mengembangkan Seni, Budaya serta Memperhatikan Kearifan Lokal	Terwujudnya Peningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Penanganan PMKS	Rasio Peningkatan Jumlah PMKS yang dilayani per - tahun	54 %
			Rasio persentase penduduk miskin dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	7,80 %

TABEL. 3

**MATRIK TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KOTA JAMBI
ATAS TARGET SASARAN IKU RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2017**

NO	MISI DAN TUJUAN RPJMD	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / SASARAN HASIL PEMBANGUNAN RPJMD (IKU RPJMD)	SATUAN	TARGET	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6		
1.	MISI 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dalam Bingkai Kearifan Lokal						
	TUJUAN : Peningkatan Peran Serta Seluruh Lapisan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Mengembangkan Seni, Budaya serta Memperhatikan Kearifan Lokal	Terwujudnya Peningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Penanganan PMKS	Rasio Peningkatan Jumlah PMKS yang dilayani per - tahun	Persen	54 %	Program Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	
			Rasio persentase penduduk miskin dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persen	7,80 %	Program Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	

TABEL. 4
PERUMUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017
DINAS SOSIAL KOTA JAMBI
ATAS INDIKATOR KINERJA RPJMD KOTA JAMBI

NO	PEMERINTAH KOTA JAMBI			UNIT KERJA / SATUAN KERJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI		
	SASARAN	INDIKATOR KINERJA RPJMD	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SKPD	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Jambi	Rasio Peningkatan Jumlah PMKS yang dilayani per - tahun	54 %	Meningkatnya Bimbingan dan Pembinaan, serta Pelatihan dan Keterampilan berusaha bagi PMKS	% Peningkatan Bimbingan dan Pembinaan, serta Pelatihan dan Keterampilan berusaha bagi PMKS	54 %
				Meningkatnya Kemampuan dan Ketrampilan PMKS	% Peningkatan PMKS yang menjadi Peserta Pelatihan Ketrampilan	54 %
				Meningkatnya Kesejahteraan, Kemandirian dan Kepercayaan Diri Berusaha bagi PMKS	% Peningkatan PMKS yang menerima Bantuan Sosial	54 %
				Meningkatnya Penanganan & Penanggulangan masalah-masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat	% Penanganan dan Penanggulangan, serta Pendistribusian bantuan social bagi korban bencana	54 %
				Meningkatnya Rehabilitasi Pemulangan Orang Terlantar ke daerah asal Tujuan	% Pemulangan Orang Terlantar ke daerah asal Tujuan	54 %
				Meningkatnya Bimbingan dan Rehabilitasi bagi Korban Narkoba dan Orang dengan HIV & AIDS	% Bimbingan dan Rehabilitasi bagi Korban Narkoba dan Orang dengan HIV & AIDS	54 %
				Meningkatnya Bimbingan & Pembinaan bagi KUBE PMKS	% Peningkatan Pembinaan & KUBE PMKS yang menerima Bantuan Sosial	54 %
		Rasio Persentase Penduduk Miskin	7,80	Masyarakat Msikin Yang mendapatkan Bantuan	% Peningkatan Jumlah Masyarakat miskin Yang Menerima Bantuan	7,80

TABEL. 5
ALASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017

1. Nama Organisasi : Dinas Sosial Kota Jambi
2. Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan Tugas Pembantuan yang meliputi :Tugas Perencanaan, Pembinaan,Pengawasan, Pengendalian, Pelayanan dan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya yang terdiri dari sekretariat dan empat bidang yang meliputi bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin
3. Fungsi :
 - a. Perumusan, Penetapan , dan Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial,rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
 - b. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - c. Penetapan standar rehabilitasi sosial;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan dinas sosial;
 - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas sosial;\Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas sosial;
 - f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan dinas sosial di daerah;
 - g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial;
 - h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan sosial;dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Indikator kinerja Utama

NO	URAIAN	JUMLAH 2017	TARGET 2017	ALASAN
1	2	3	4	5
i.	URUSAN SOSIAL :			
	1. Peningkatan Jumlah PMKS yang dilayani dan memperoleh bantuan Sosial per tahun :			1. Meningkatkan harkat dan martabat bagi PMKS
	1. Anak Terlantar	-	-	
	2. Anak Nakal	140	250	2. Meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian PMKS
	3. Anak Jalanan	110	200	
	4. Korban Tindak Kekerasan	-	-	3. Meningkatkan kualitas Kemampuan dan Ketrampilan Berusaha bagi PMKS
	5. Lanjut Usia Terlantar	-	-	
	6. Pengemis	85	150	
	7. Gelandangan / Gelandangan Psykotic	40	150	4. Meningkatkan Kesejahteraan bagi PMKS
	8. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	-	-	
	9. Pekerja Migran Terlantar/Bermasalah Sosial/Orang Terlantar	201	250	
	10. Penyandang Cacat	253	580	5. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di tengah-tengah masyarakat
	11. Tuna Susila (PSK)	4	20	

12. Korban Penyalahgunaan Narkoba/Psikotropika & Zat Adiktif (NAPZA)	-	-
13. Orang dengan HIV / AIDS	-	-
14. Wanita Rawan Sosial Ekonomi	45	250
15. Keluarga Miskin / Fakir Miskin	31.707	26.751
16. Keluarga Berumah Tak Layak Huni	-	-
17. Keluarga Rentan	-	-
18. Keluarga Bermasalah Psikologi	-	-
19. Anak Balita Terlantar	-	-
20. Korban Bencana Alam	2.640	3.500

TABEL. 6
LAPORAN CAPAIAN INDIATOR KINERJA UTAMA (IKU) RPJMD
DINAS SOSIAL KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	MISI DAN TUJUAN RPJMD	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / SASARAN HASIL PEMBANGUNAN RPJMD (IKU RPJMD)	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI	TARGET RPJMD	% CAPAIAN	KETERANGAN (Perhitungan Realisasi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	MISI : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dalam Bingkai Kearifan Lokal							Perhitungan Realisasi $\frac{\sum \text{Capaian} \times 100}{\sum \text{Target}} = \dots \%$
2	TUJUAN : Peningkatan Peran Serta Seluruh Lapisan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Mengembangkan Seni, Budaya serta Memperhatikan Kearifan Lokal	Terwujudnya Peningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Penanganan PMKS	Rasio Peningkatan Jumlah PMKS yang dilayani per – tahun	5.350 org	3.518 org	54 %	65,76 %	$\frac{3.518 \times 100}{5.350} = 63,76 \%$
			Rasio Persentase Penduduk Miskin	31.707 org	26.751 org	7,80 %	84,37 %	$\frac{26.751 \times 100}{31.707} = 84,37 \%$

TABEL. 7
MATRIK PERHITUNGAN REALISASI & PERSENTASE CAPAIAN
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ATAS TARGET SASARAN HASIL PEMBANGUNAN RPJMD (IKU RPJMD)
DINAS SOSIAL KOTA JAMBI @ TAHUN 2017

NO	MISI DAN TUJUAN RPJMD	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / SASARAN HASIL PEMBANGUNAN RPJMD (IKU RPJMD)	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	TARGET RPJMD	% CAPAIAN	KETERANGAN (Perhitungan Realisasi)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MISI : Mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing						Perhitungan Realisasi $\frac{\sum \text{Capaian} \times 100}{\sum \text{Target}} = \dots \%$
2.	TUJUAN : Mendorong tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kompetensi kerja masyarakat Kota Jambi yang religius	Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Jambi	Rasio Peningkatan Jumlah PMKS yang dilayani per – tahun : Target IKU : 1. Anak Nakal : 250 org 2. Anak Jalanan : 200 org 3. Pengemis : 150 org 4. Gelandangan : 150 org 5. Orang Terlantar : 250 org 6. Penyandang Cacat : 580 org 7. Tuna Susila : 20 org 8. Wanita Rwn Sosek : 250 org 9. Korban Bencana Alam : 3.500 org <hr/> Jumlah : 5.350 org	5.350 org	54 %	63,07 %	Perhitungan Realisasi $\frac{3.518 \times 100}{5.350} = 65,76 \%$ Realisasi IKU : 1. Anak Nakal : 140 org 2. Anak Jalanan : 110 org 3. Pengemis : 85 org 4. Gelandangan : 40 org 5. Orang Terlantar : 201 org 6. Penyandang Cacat : 253 org 7. Tuna Susila : 4 org 8. Wanita Rwn Sosek : 45 org 9. Korban Bencana Alam : 2.640 org <hr/> Jumlah : 3.518 org
			Rasio persentase Penduduk Miskin per – tahun : Target IKU : 1. Keluarga Miskin : 31.707 Org	26.751 org	7.80 %	84,37 %	Perhitungan Realisasi $\frac{26.751 \times 100}{31.707} = 84,37 \%$ Realisasi IKU : 1. Keluarga Miskin : 26.751 org

TABEL. 8
ALASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KOTA JAMBI
ATAS TARGET SASARAN IKU RPJMD KOTA JAMBI TAHUN 2017

1. Nama Organisasi : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi
2. Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan Tugas Pembantuan yang meliputi :Tugas Perencanaan, Pembinaan,Pengawasan, Pengendalian, Pelayanan dan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya yang terdiri dari sekretariat dan empat bidang yang meliputi bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin
3. Fungsi :
 - a. Perumusan, Penetapan , dan Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial,rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
 - b. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - c. Penetapan standar rehabilitasi sosial;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan dinas sosial;
 - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas sosial;\Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas sosial;
 - f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan dinas sosial di daerah;
 - g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial;
 - h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan sosial;dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Indikator kinerja Utama

NO	URAIAN	JUMLAH (Orang)	TARGET 2017	REALISASI CAPAIAN 2017	PERSENTASE CAPAIAN (%)	ALASAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	URUSAN SOSIAL :					
	1. Peningkatan Jumlah PMKS yang dilayani dan memperoleh bantuan per tahun :					1. Meningkatkan harkat dan martabat bagi PMKS
	a. Anak Terlantar	-	-	-	-	
	b. Anak Nakal	140	250	140	56	2. Meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian PMKS
	c. Anak Jalanan	110	200	110	50	
	d. Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	
	e. Lanjut Usia Terlantar	-	-	-	-	3. Meningkatkan kualitas Kemampuan dan Ketrampilan Berusaha bagi PMKS
	f. Pengemis	85	150	85	56,67	
	g. Gelandangan	40	150	40	26,67	
	h. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
	i. Pekerja Migran Terlantar/Bermasalah Sosial /Orang Terlantar	201	250	201	80,40	
	j. Penyandang Cacat	253	580	253	43,62	4. Meningkatkan Kesejahteraan

k. Tuna Susila (PSK)	4	20	4	20	bagi PMKS 5. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di tengah-tengah masyarakat
l. Korban Penyalahgunaan Narkoba/Psikotropika & Zat Adiktif	-	-	-	-	
m. Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	-	-	-	-	
n. Wanita Rawan Sosial Ekonomi	45	250	45	18	
o. Keluarga Miskin	26.751	31.707	26.751	84,37	
p. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	-	-	-	-	
q. Keluarga Rentan	-	-	-	-	
r. Korban Bencana Alam	2.640	3.500	2.640	75,43	

**LAPORAN CAPAIAN INDIATOR KINERJA UTAMA (IKU) RPJMD
DINAS SOSIAL KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	ANGKA AWAL	% CAPAIAN 2016	2017			TARGET AKHIR
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Peningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Penanganan PMKS	Rasio Peningkatan Jumlah PMKS yang dilayani per – tahun	30,00 %	57,83 %	54 %	50,32 %	93,18 %	<u>60 %</u>
		Rasio Persentase Penduduk Miskin	9,80 %	81,57 %	7,80 %	11,82 %	151,54 %	<u>7,30 %</u>

**LAPORAN CAPAIAN INDIATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERJANJIAN KINERJA 2017
DINAS SOSIAL KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	2017		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	3	4	7	6	8
1.	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat	Besaran % (persentase) peningkatan Jumlah Penanggulangan dan Penanganan serta Pendistribusian Bantuan Sosial bagi Korban Bencana Alam	100 %	99,96 %	99,96 %
2	Perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS	Besaran pelayanan kesejahteraan Sosial bagi RTSM Penerima program keluarga harapan (PKH) dikota jambi	100 %	93,27 %	93,27 %
3	Pemberdayaan dan pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Besaran peningkatan kualitas pemberdayaan pengurus K3S,LK3, PSM, TKSK dan Karang Taruna kota Jambi	100 %	84,26 %	84,26 %
4	Pembinaan dan pelayanan sosial bagi orang terlantar	Besaran peningkatan pelayanan bagi orang terlantar dalam meneruskan perjalanan	100 %	99,94 %	99,94 %
5	Pelayanan dan pembinaan sosial bagi anak yang bermasalah sosial dan lansia	Besaran Meningkatnya layanan dan binaan bagi anak yang bermasalah social, pengangkatan anak, lansia dan korban tindak kekerasan	100 %	97,32 %	97,32 %
6	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial	Besaran Penurunan masalah Kesejahteraan Sosial bagi Gepeng Eks PSK, Eks Napi, Eks Psikotik dan Tuna Wisma	100 %	97,69 %	97,69 %
7	Pelayanan dan Rehabilitasi Disabilitas, Korban Napza	Besaran Terlaksananya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Korban Napza	100 %	98,88 %	98,88 %

8	Pelayanan dan Pembinaan Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	Besaran Terlaksananya nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial sebagai nilai dasar kesejahteraan sosial kepada masyarakat	100 %	96,67 %	96,67 %
9	Pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana bantuan social	Besaran peningkatan Pengetahuan tentang izin pengumpulan uang	100 %	98,60 %	98,60 %
10	Pendataan dan Informasi Fakir Miskin	Besaran meningkatnya system informasi Terpadu bagi keluarga miskin di Kota Jambi dan Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dan Sistem Informasi bagi Fakir Miskin di Kota Jambi	100 %	92,65 %	92,65 %
11	Penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan Fakir Miskin	Besaran meningkatnya pengetahuan keterampilan berusaha membuat kuliner bakso, tekwan dan pempek bagi keluarga miskin dan peralatan bagi KUBE Fakir Miskin melalui pemberian Bantuan Peralatan	100 %	96,81 %	96,81 %
12	Pembinaan dan Pelayanan sosial fakir miskin	Besaran meningkatnya pelayanan bagi Fakir Miskin di Kota Jambi dan terlaksananya perda tentang Fakir Miskin dan tersalurnya Bantuan Masyarakat melalui UEP KUBE bagi Fakir Miskin dan Pemberian Rekomendasi Penanganan Fakir Miskin	100 %	94,13 %	94,13 %

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2017 Dinas Sosial Kota Jambi diharapkan dapat menjadi pedoman seluruh aparat Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi dalam melaksanakan program kegiatan secara efektif, efisien dan akuntabel. Penetapan Kinerja ini memungkinkan seluruh anggota organisasi dapat memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas dan dijabarkan dalam program dan kegiatan selama tahun 2017.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Jambi ini merupakan rangkaian rencana program kegiatan untuk Tahun 2017 yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Jambi sebagai penjabaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional, hal ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kerja Kota Jambi.

Untuk ini diharapkan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Jambi yang direncanakan akan terlaksana dan terkoordinasi dengan baik serta dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan strategis dalam kurun waktu tersebut akan senantiasa mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana ini, semoga dapat bermanfaat dan dalam menjalankan tugas kedepannya mempunyai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas yang diemban dalam kegiatan pembangunan Daerah Kota Jambi.

Jambi, Januari 2018

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA JAMBI



H.KASPUL, SH, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19590905 198303 1 008